**ABSTRAK**

Perilaku investasi yang ada di Indonesia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan penyebab dari semua ini diantaranya adalah masih tingginya risiko investasi, seperti permasalahan mengenai ketidakpastian hukum dan keamanan sampai kepada rumitnya birokrasi perizinan untuk melakukan investasi di daerah. Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup dalam hal ini tidak hanya tentang teknis administrasi (prosedur, waktu dan biaya) sebagaimana dipahami oleh aparat pemerintahan selama ini,permasalahannya adalah bagaimanakah kedudukan Pemerintah dalam sistem perizinan untuk meningkatkan investasi terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan,khususnya di Kota Cimahi dan bagaimanakah pengaturan pelayanan perizinan terpadu bagi perusahaan industri untuk meningkatkan investasi dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, khususnya di Kota Cimahi serta Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan investasi khususnya di Kota Cimahi bagi perusahaan industri dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan dan cara penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan interdispliner. pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk meneliti dan mengakaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan industri dan penanaman modal, dengan di dukung pendekatan interdisipliner yang digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai industri dan penanaman modal sehingga gejala-gejala hukum yang timbul dapat di tafsirkan secara faktual.

Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan Pemerintah dalam sistem perizinan untuk meningkatkan investasi terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 26 Tahun 2003 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelayanan Pemberian Izin Usaha Industri. Maksud pemberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri serta Persetujuan Prinsip dalam peraturan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya melengkapi legalitas usahanya. dan Pengaturan pelayanan perizinan terpadu bagi perusahaan industri dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan di Kota Cimahi setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006, lebih memberikan kepastian hukum dan pengaturan dalam pelaksanaannya, mengingat Kota Cimahi sudah mengupayakan proses ini sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri tersebut. Banyak peraturan daerah di Kota Cimahi yang sudah mengakomodasi dan mendukung ketentuan tersebut sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan mendukung pembangunan daerah serta Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu bagi industri dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan di Kota Cimahi lebih kepada ketidakpastian peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah, kelembagaan dan teknologi yang digunakan serta sumber daya manusia juga menjadi permasalahan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dengan pemberian sanksi yang berupa sanksi administrasi. Sanksi administrasi, penyelesaian masalah lingkungan di luar pengadilan bahkan sanksi pidana telah di atur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, terhadap penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan /atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.

**Kata Kunci : Perizinan, Investasi, Lingkungan Hidup**

***ABSTRACT***

*The behavior of investment in Indonesia is not in accordance with what is expected of them the cause of all this is the high risk investments, such as issues concerning security and legal uncertainty to the complexity of the bureaucratic licensing to invest in the area. Licensing integrated environmental field in this case is not just about the technical administration (procedures, time and cost) as understood by government officials during this time, the problem is how the position of the Government in the licensing system to increase investment to safeguard and environmental management based on laws invitation, especially in Cimahi, and how settings licensing services integrated for industrial companies to increase investment in the preservation of environmental functions after the issuance of the Regulation of the Minister of the Interior No. 24 of 2006, particularly in Cimahi and What constraints faced in the implementation of Licensing Services One Stop to increase investment, especially in Cimahi for industrial companies in the preservation of environmental functions and how its completion.*

*The method used is a normative juridical approach and interdisciplinary approach. normative juridical approach taken to investigate and mengakaji legislation relating to the industry and investment, with the support interdisciplinary approach that is used to understand the concepts of industry and investment so that the symptoms of law that arise be construed as factual.*

*The results showed the Government Position in the licensing system to increase investment to safeguard and environmental management based Cimahi Regional Regulation No. 26 Year 2003 regarding Provisions and Procedures Giving Industrial Business License Services. Purpose of providing Industrial Business License and Industrial Registered and Principal Approval of the regulation is to provide legal certainty and certainty for the company that has carried out its obligations complements the legality of its business. and setting a unified licensing services for industrial companies in the preservation of environmental functions in Cimahi after the issuance of the Regulation of the Minister of the Interior 24, 2006, greater certainty in the implementation of law and regulation, given Cimahi already pursue this process prior to the issuance of the Ministerial Regulation. Many local regulations in Cimahi already accommodate and support these provisions so that its implementation more effective and to support regional development as well as the obstacles encountered in the implementation of the licensing service one stop for the industry in the preservation of environmental functions in Cimahi over the uncertainty of legislation both at central and local levels, institutional and technology used as well as human resources is also a problem in optimizing the service to the public in the field of licensing. Enforcement of environmental law can be done by imposing sanctions in the form of administrative sanction. Administrative sanctions, solution of environmental problems out of court even criminal sanctions have been regulated in Law No. 32, 2009, against the party responsible for a business and / or activities to prevent and end violations, and overcome consequences caused by an offense, action rescue, response and / or recovery over the expense of the party responsible for a business and / or activities unless specified Another under the Act.*

***Keywords: Licensing, Investment, Environment***